



# **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SUKATANI KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT**

**Ade Herlina<sup>1</sup>; Dody Hermana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut

## **Abstrak**

Belum efektifnya pembangunan fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, banyak faktor penyebabnya diantaranya belum terimplementasikannya kebijakan Alokasi Dana Desa dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah menemukan data dan informasi mengenai besarnya pengaruh implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey dengan jumlah populasi 206 orang responden.

Berdasarkan analisis statistik, terbukti Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut secara keseluruhan masih belum optimal, walaupun terlihat bahwa semua pelaksana kebijakan memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, efektivitas pembangunan fisik desa di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut secara keseluruhan masih belum optimal walaupun terlihat bahwa pembangunan fisik desa mengusahakan tercipta sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan sehingga dapat membuka isolasi desa dan memberikan peluang terciptanya ekonomi produktif.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Efektivitas Pembangunan.

## **1 Pendahuluan**

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dialokasikan kepada Pemerintah Desa agar digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dimana mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dikembangkan melalui pola pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan Alokasi Dana Desa ini efektivitas pembangunan desa-desa di Kabupaten Garut dapat tercapai.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan bagi masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian bantuan langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya, gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa ini sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa yang mengamankan tersedianya dana yang cukup bagi pembangunan sehingga diharapkan dengan adanya dana yang cukup efektivitas pembangunan pedesaan dapat tercapai.

Banyak faktor yang menyebabkan efektivitas pembangunan di Desa Sukatani belum tercapai salah satunya berkaitan dengan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari organisasi pengelola ADD kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan fisik desa.
2. Kurang diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam surat Bupati nomor 512/Kep.358 – BPMPD/2016 dijelaskan bahwa rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang direncanakan.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan yang menggunakan dana Alokasi Dana Desa dibidang pembangunan fisik desa lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa.
4. Keikutsertaan masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan fisik desa yang dibiayai ADD masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

## 2 Kajian Teori

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci, melekat, dan terintegrasi dalam kehidupan administrasi sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks sekaligus kritis, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman terhadap kompleksitas implementasi kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana.

Kegiatan implementasi kebijakan akan menghasilkan suatu perubahan, baik perubahan fisik maupun non fisik yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kinerja kebijakan dan proses implementasi kebijakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dilihat dari prinsip demokrasi, desentralisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

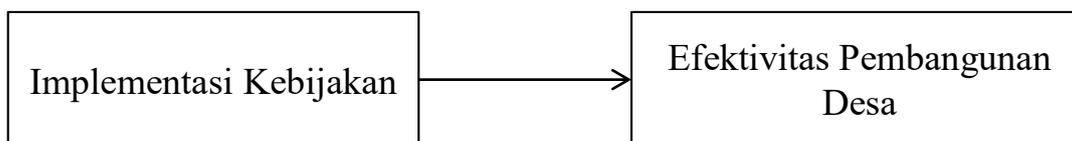
tujuan yang diinginkan. Salah satu tujuan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa adalah tercapainya efektivitas pembangunan di pedesaan

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bila dilihat dari aspek segi keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan. Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Tujuan utama pembangunan desa adalah agar desa dapat berkembang dan bersaing untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat yang lebih baik sehingga pembangunan desa merupakan suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan tugas pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung tujuan pembangunan tersebut.

Dari keterkaitan antar konsep dalam kerangka pemikiran tersebut maka dapat diasumsikan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan fisik desa.

Selanjutnya, hipotesis penelitian ini dirumuskan: “Terdapat pengaruh signifikan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut”. Adapun model penelitian disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian

### 3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausalitas, yang mana deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel yang diteliti sedangkan kausalitas untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang terdiri dari satu variabel bebas atau independen (variabel x) yaitu Implementasi Kebijakan ADD dan satu variabel terikat atau dependen (variabel y) yaitu Efektivitas Pembangunan Desa. Selanjutnya, disusun operasional variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Intensitas sosialisasi kebijakan b. Pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan ADD
	2. Sumberdaya	a. Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana ADD b. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD
	3. Disposisi/Sikap	a. Sikap pelaksana terhadap kebijakan ADD b. Respon pelaksana kebijakan ADD
	4. Struktur birokrasi	a. Pembentukan struktur organisasi b. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan
Efektivitas Pembangunan Desa	1. Metode	a. Perencanaan melibatkan masyarakat b. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh anggota masyarakat
	2. Proses	a. Dilakukan secara swadaya dan bersifat gotong-royong b. Kesiapan menerima kemajuan ilmu dan teknologi
	3. Tujuan	a. Memperbaiki taraf hidup masyarakat b. Menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan mata pencaharian c. Menciptakan pelayanan publik yang sama dengan daerah perkotaan d. Mengusahakan terciptanya sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sukatani, dengan kriteria sebagai berikut: 1) Aktif dalam kelembagaan di desa selama 2 tahun berturut-turut; 2) Menjadi pengurus lembaga minimal 1 tahun berturut-turut. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat populasi 206 orang.

Selanjutnya, dengan menggunakan Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah teknik *Simple Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:93) “*Simple Random Sampling* ialah cara pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen”. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 orang.

### 3.3 Alat Ukur dan Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu untuk mengkuaitatifkan data kualitatif, maka dilakukan analisis pembobotan dengan menentukan skor tertinggi yang dikurangi oleh skor yang terendah, dibagi ke dalam lima interval.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Sugiono, 2013). Oleh karena itu, untuk mengukur nilai jawaban dari angket atas pendapat dan persepsi dari setiap responden dan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam Skala Likert adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Penilaian Skala Likert

No	Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
1	Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
2	Setuju	4	Setuju	2
3	C-D	3	C-D	3
4	Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber: (Sugiono, 2013)

### 3.4 Teknik Analisis Data

Sedangkan data kuantitatif bersumber pada hasil penyebaran angket kepada responden. Data tersebut dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi Rank Spearman. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pelayanan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut dalam persentase, maka digunakan koefisien penentu atau koefisien determinan (KD).

## 4 Hasil dan Implikasi

Dari hasil pembahasan pada variabel implementasi kebijakan ADD diketahui nilai rata-rata tertinggi sebesar 82,3% terdapat dalam indikator mengenai “Pelaksana kebijakan ADD cepat tanggap (responsif) atas kebijakan ADD“. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pelaksana kebijakan memiliki respon yang baik terhadap kebijakan ADD karena kebijakan ADD sangat diharapkan dan sudah menjadi rutinitas setiap tahun.

Nilai rata-rata terendah sebesar 72,5% terdapat dalam indikator mengenai “Selama ini kebijakan ADD disosialisasikan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat“. Dari nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa selama ini kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya.

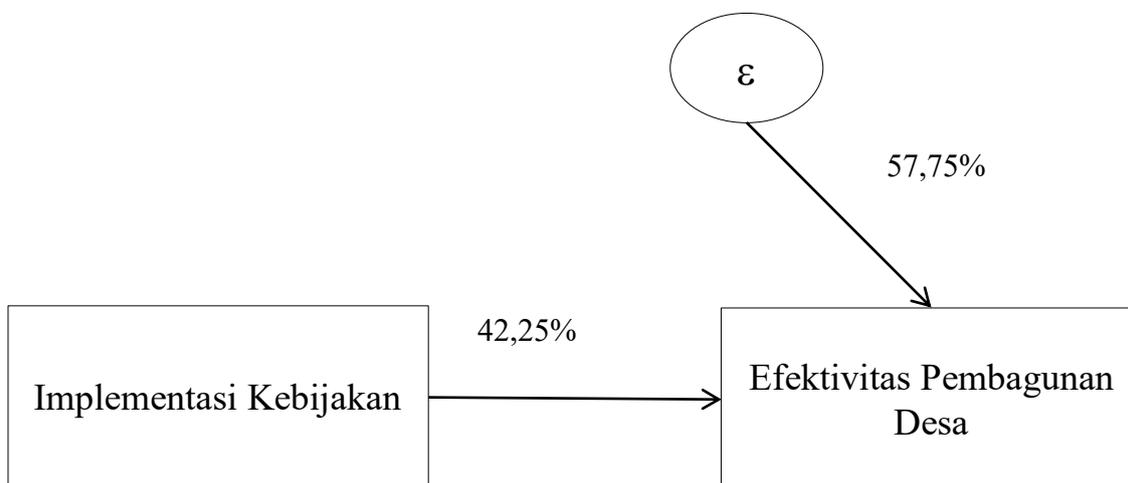
Temuan permasalahan dalam Implementasi Kebijakan ADD adalah kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang memahami isi kebijakan ADD sehingga masyarakat kurang mengetahui peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan ADD ini.

Sedangkan pada variabel efektivitas pembangunan fisik desa nilai rata-rata tertinggi sebesar 83,8% terdapat pada indikator mengenai “Dengan pembangunan fisik desa diusahakan untuk menciptakan sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan“. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik desa mengusahakan tercipta sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan sehingga dapat membuka isolasi desa dan memberikan peluang terciptanya ekonomi produktif.

Sedangkan dilihat dari nilai rata-rata terendah sebesar 77,3% terdapat pada indikator “Pembangunan fisik desa perencanaannya melibatkan masyarakat”. Dari nilai yang rendah ini menunjukkan bahwa Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, kurang mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang direncanakan.

Temuan permasalahan dalam variabel efektivitas pembangunan fisik desa ini bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan fisik desa. Kegiatan yang menggunakan dana Alokasi Dana Desa dibidang pembangunan fisik desa lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa.

Besarnya pengaruh pengaruh Implementasi Kebijakan ADD terhadap efektivitas pembangunan fisik desa di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, sebesar 42,25% sedangkan 57,75% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti diantaranya pengaruh kepemimpinan kepala desa. Sehingga disimpulkan Implementasi Kebijakan ADD harus dioptimalkan lagi karena Implementasi Kebijakan ADD mempunyai pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pembangunan fisik desa. Berikut penulis gambarkan besaran pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pelayanan :



Gambar 2. Gambar Besarnya Pengaruh Variabel (X) Implementasi Kebijakan Terhadap Variabel (Y) Efektivitas Pembangunan Desa

## 5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut secara keseluruhan masih belum optimal, walaupun dalam indikator “Respon pelaksana kebijakan ADD“ terlihat bahwa semua pelaksana kebijakan memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, tetapi pada indikator “Kebijakan ADD disosialisasikan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat” menunjukkan bahwa selama ini kurang adanya sosialisasi kebijakan ADD dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat serta adanya temuan permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat kurang memahami isi kebijakan ADD sehingga masyarakat kurang mengetahui peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan ADD ini, sikap pelaksana kebijakan yang menganggap ADD sebagai kegiatan rutin dan masih rendahnya kemampuan aparat desa sebagai pelaksana kebijakan ADD.

2. Efektivitas pembangunan fisik desa di Desa Sukatani Kecamatan Cisurepan kabupaten Garut secara keseluruhan masih belum optimal walaupun dalam indikator “Dengan pembangunan fisik desa diusahakan untuk menciptakan sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan” terlihat bahwa pembangunan fisik desa mengusahakan tercipta sarana fisik yang sama dengan daerah perkotaan sehingga dapat membuka isolasi desa dan memberikan peluang terciptanya ekonomi produktif tetapi pada indikator “Pembangunan fisik desa perencanaannya melibatkan masyarakat” terlihat bahwa tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembuatan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), serta adanya temuan permasalahan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan fisik desa. Kegiatan yang menggunakan dana Alokasi Dana Desa dibidang pembangunan fisik desa lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa.

## 6 Rekomendasi

Berlatar belakang dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Sosialisasi kebijakan ADD hendaknya diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Dalam pembuatan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) pemerintah desa hendaknya melibatkan lembaga kemasyarakatan dan menyerap aspirasi yang bergulir di masyarakat.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Pentingnya dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola ADD dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan terutama akibat sering berubahnya kebijakan tahapan pencairan dana ADD.
5. Pemerintah desa hendaknya melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik desa, mendorong partisipasi, gotong-royong dan swadaya sehingga masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

## Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2003. *Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Grindel, Merilee S. (ed). 2000. *Politic and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Hakim, Abdul. 2008. *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*, Edisi Pertama. Malang: Bayu Media Publishing.

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Dan Sumber Daya Manusia* (Edisi 12), BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Iskandar, Jusman. 2005. *Kapita Selekta Administrasi Publik*. Bandung: Puspaga
- 2009. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2002. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khaerudin. 2006. *Pembangunan Desa*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liang Gie, The. 2009. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma, IIP.
- Nazir, Mohamad. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riduwan. 2006. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siegel, Sidney. 1992. *Statistik Non Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Penerjemah Zanzawi Suyuti dan Landung Simatupang. Jakarta: Gramedia.
- Sudjana. 2008. *Metode statistika*. Garut: Tarsito.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Garut: Alfabeta.
- Sunggono. 2004. *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Wahab, Solichin A. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra. 2004. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- , 2012. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial. UGM.

## **Dokumen**

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa

Surat Bupati Nomor 07 Tahun 2016 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2016